

Relasi Etnisitas dan Industrialisasi Era Kolonial Inggris di Malaysia

by

Muhaimin Zulhair A.¹

Abstract

Ethnicity and industrialization are usually analyzed separately. Even if seen interlink, the analysis usually focused on the industrial chains itself (actor proximity, component makers and industry sustainability). This paper intends to come out of that tradition and to be linked with the historical colonial practice that will give to a more comprehensive understanding. By taking the Malaysia colonial context is expected to show the linkages. The issue of ethnicity in this paper is not seen as something that stands alone and domestic but is related to the practice of the colonial political economy strategies to manage the problems become the dominant discourse.

Keywords: *ethnicity, industrialization, discourse, colonial political economy strategies*

Pendahuluan

Industrialisasi merupakan fenomena internasional. Fenomena ini berusia sama dengan kapitalisme yang bertransformasi gradual. Penyebarluasannya di dunia mengikuti pola – praktek kolonial dan pembentukan sistem diskursus dominan. Industrialisasi fase awal berlangsung dalam sistem sosial feodalisme berpola patron – klien, sistem ekonomi feodal tuan tanah dan penggarap serta dalam sistem makro politik monarki.

Permasalahan etnisitas di Malaysia telah mengkristal sampai sekarang ini di berbagai sendi kehidupan (ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya). Tulisan ini hendak melacak bagaimana relasi etnisitas diperlakukan dalam hubungannya dengan diskursus industrialisasi yang diupayakan kolonial Inggris melalui serangkaian strategi dalam mencapai tujuan ekonomi politiknya.

Hipotesa yang coba dibuktikan dalam tulisan ini yaitu pertama, permasalahan etnisitas di Malaysia bukan permasalahan etnis *per se*, tetapi

¹ Penulis aktif sebagai Peneliti di Pusat Kegiatan Penelitian Universitas Hasanuddin dan Komunitas Tanah Hindie

beririsan banyak dengan praktek ekonomi politik kolonial. Kedua, relasi keduanya saling meneguhkan sekaligus konfliktual dengan penebalan permasalahan etnisitas. Ketiga, industri bertumbuh dan membesar.

Dalam ruang Malaysia² sendiri terdapat tiga kolonial yang silih berganti mempengaruhi formasi lokal yaitu Portugis pada tahun 1511, Belanda menggantikan Portugis pada 1641, EIC (East India Company) mendirikan perwakilan di Semenanjung Malaya tepatnya di Penang pada 1786, Raffles menduduki Singapura pada 1819 dan Inggris secara *de jure* (treaty of London) menggantikan Belanda pada 1824.

Sementara administrasi Inggris di Utara Kalimantan dimulai sejak datangnya James Brooke pada 1839 dan berelasi kuat dengan Sultan. Brooke menjadi Gubernur Serawak pada 1841-2 sebagai hadiah telah membantu Sultan memadamkan pemberontakan lokal. Hal ini menjadi katastropik bagi Sultan Brunei karena mengalami penyusutan wilayah³. Sementara dilain pihak British North Borneo Company yang di inisiasi Brooke sebagai regulator Sabah dan Serawak yang mendapat dukungan resmi dari kerajaan Inggris pada 1884 terus ekspansif dan menguat.

Sebelum menjawab pertanyaan “bagaimana” yang berhubungan dengan cara, secara ontologis tulisan ini mengakui adanya/terdapatnya relasi antara etnisitas dan industrialisasi itu sendiri. Tentu saja relasi antar etnis telah jauh berinteraksi sebelum masuknya Inggris. Beberapa tulisan mengenai industri yang ada seperti Fred R.von Mehden⁴, Leslie Lopez⁵, Wan Fairuz Wan Cik⁶, dan Jomo K.S⁷ belum memotret relasi etnistis dan praktek diskursus industrialisasi

² Federasi Malaysia terbentuk 31 Agustus 1957, kemudian diperluas Federasi Malaysia yang melingkupi daerah Sabah-Serawak (utara Kalimantan) pada 16 September 1963, Singapura keluar dan mendeklarasikan kemerdekaan pada 9 Agustus 1965

³ Lihat Hatun Abdul Majid, *Rebellion in Brunei: The 1962 revolt, Imperialism, Confrontation and Oil*, London: I.B Tauris, 2007.

⁴ Fred R.von der Mehden, *Petronas: A National Oil Company with A International Vision*, the James A.Baker III Institute For Public Policy Rice University. 2007

⁵ Leslie Lopez, *Petronas: reconciling tensions between company and state*, dalam David G.Victor, David R.Hults, Mark C. Thurber, *Oil and Governance: State-owned enterprises and the world energy supply*. Cambridge:Cambridge University Press, 2012

⁶ Wan Fairuz Wan Chik, S.Selvadurai dan A.C.Er, *Historical of Industrial Development Strategies in Penang over the Last Five Decades: A Study of the SMEs*,

⁷ Jomo K.S et.al, *Malaysia Industial Policy*. Singapore: NUS Pres, 2007.

secara historis.

Konseptual

Diskursus disini memakai konsep dari Foucault. Diskursus bukan hanya semacam wacana atau opini semata tidak memiliki kekuatan/*kekuasaan/power* dan tidak material tetapi sebaliknya mempunyai kekuatan dan material. Diskursus menjadi *episteme* atau pengetahuan khusus yang menjadi landasan dan mendisiplinkan. Diskursus dapat berasal dari kondisi material dan juga menghasilkan kegiatan material. Sebuah pengetahuan dominan tidak dapat tampil sendiri, ia harus ditampilkan. "Penampilan" di permukaan ini merupakan sebuah proses praktek ekonomi sosial politik lintas agen/aktor dalam konteks historis, terevaluasi waktu dalam ruang geografis partikular.

Kekuasaan dan kedaulatan dalam arti Foucault tidak lagi terbatas dalam istilah yang sempit seperti keadilan maupun yuridis melainkan berhubungan dengan taktik dan strategi. Kekuasaan tidak lagi digambarkan negatif represif, tetapi berfungsi produktif, simbolik dan disiplin. Kekuasaan dapat diterima karena fakta sederhana bahwa kekuasaan tidak hanya hadir di depan kita sebagai kekuatan yang berkata tidak, namun ia juga melintasi dan memproduksi benda-benda, menimbulkan/membujuk kesenangan, membentuk pengetahuan dan memproduksi wacana.⁸

Relasi-relasi kekuasaan mendukung dan didukung oleh jenis-jenis pengetahuan tertentu. Strategi bukan hanya bertugas mempertahankan kekuasaan melainkan juga menonjolkan, menstabilkan dan memperluas dirinya sendiri.⁹ Relasi *power* dan *knowledge* secara langsung menyatakan satu sama lain, tidak ada relasi kekuasaan/*power* tanpa korelatif dengan medan pengetahuan.¹⁰

Colin Gordon megartikulasikan Foucault, diskursus bukan lagi sekedar media bagi strategi melainkan sumber dari strategi.¹¹ Burr dan Gergen dalam

⁸ Michel Foucault. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*.terj.Yudi Santosa.Bentang Budaya: Yogyakarta, 2002. p.148

⁹ ibid p.255

¹⁰ Michel Foucault, *Dicipline and Punish: The Birth of the Prison*, 2nd edition translated by Alan Sheridan, Vintage Book: New York, 1995. p.27

¹¹ ibid p.310

Jorgensen dan Phillips mengemukakan empat premis utama pendekatan analisis diskursus dalam konstruksi sosial yaitu pendekatan kritis pada pengetahuan yang dianggap lumrah apa adanya, kekhususan kultural dan historis, hubungan antara pengetahuan dan proses sosial, hubungan antara pengetahuan dan tindakan sosial.¹² Tulisan ini akan berpegang pada empat premis tersebut dengan titik tekan strategi kolonial Inggris dalam memperlakukan etnisitas demi pencapaian tujuan ekonomi politik.

Analisa

Industrialisasi di Malaysia berbicara banyak tentang peninggalan kolonial terutama Inggris. Berlaku surut, pihak Inggris memainkan peranan cukup vital bagi dinamisasi spektrum ekonomi sosial politik Malaysia. Strategi Inggris mengevaluasi kebijakan ketat kedua kolonial pendahulunya dengan sesuatu yang akomodatif dan liberal demi kepentingan ekonomi berkelanjutan. Kepentingan ekonomi menjadi dasar, dominan dan utama bagi pihak kolonial. Sebelumnya Portugis ketat dalam wacana pendisiplinan melalui kepatuhan ajaran agama serta Belanda yang ketat dalam monopoli perdagangan. Strategi akomodatif pihak Inggris menghasilkan kekuatan dalam arti produktif dengan elit lokal. Relasi pihak Inggris dengan elit lokal merupakan relasi *par excellence*.

Relasi berbentuk aliansi pihak Inggris – pemimpin Melayu dapat ditemukan bahkan sebelum Inggris menjadi kolonial dominan. Misalnya awal masuknya kolonial Inggris menerapkan aliansi strategis dengan kerajaan lokal (Sultan Kedah, Selangor, Johor, Pahang dan Negeri Sembilan) untuk mengalahkan VOC. Strategi yang sama juga diterapkan dengan VOC sebelumnya ketika menghadapi Portugis tetapi ternyata kehadiran Belanda tidak mengubah banyak konstalasi kebijakan ekonomi politik Portugis.¹³

¹² Marianne W.Jorgensen, Louise J. Philips. *Analisis Wacana: Teori dan Metode*.terj.Imam Suyitno dkk. Jakarta: Pustaka Pelajar.2007. p.329

¹³ Triaman Wulandari, Dwiana Hercahyani, et.al, *Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura (1824-2009)*, Depok: Gramata,2009. p.27

Diskursus industrialisasi penulis kategorikan menjadi tiga tahap yaitu *basic*, *intermediate* dan *advanced*¹⁴. Sebelum pihak Inggris melakukan kegiatan industri besar-besaran setidaknya pihak Inggris harus terlebih dahulu mengkonstruksi diskursus industri yang dasar/*basic*. *Basic* dalam artian memberikan jawaban positif atas pernyataan apakah eksistensi industri diperlukan, baik dan menguntungkan serta tidak merugikan bagi tuan rumah (dalam hal ini elit Melayu). Demi industrialisasi yang berjalan baik dibutuhkan dukungan pihak tuan rumah terutama untuk mendapatkan keadaan yang stabil. Kolonialisme harus tampil dengan wajah yang baik hati sebagai evaluasi strategi dua kolonial yang ketat sebelumnya.

Untuk mendapatkan dukungan tersebut pihak Inggris mengadakan aliansi strategis, kerjasama resiprokal dan *quid pro quo* ekonomi politik dengan elit Melayu. Sehingga pengetahuan elit Melayu secara garis besar dan rakyat Melayu tidak lagi mempertanyakan apakah eksistensi kolonial ini berbahaya atau tidak tetapi melahirkan opsi yang lain yaitu daya imajinasi produktif dan berefek menyebar misalnya penjaga stabilisasi keamanan, pencipta nilai ekonomi, pembangunan dan sebagainya sehingga posisinya mitra kooperatif. Elit Melayu menjadi penting untuk “dipegang” karena secara sosial kemasyarakatan berpola patron-klien.

Strategi Inggris dari hal ini adalah *positioning* dari keadaan yang bernarasikan ancaman terhadap formasi kekuatan feodal lokal sehingga dapat melegitimasi eksistensinya di semenanjung Malaya. Misalnya abad 19 sekitar 1826-1842 kerajaan Siam yang ekspansif menjadi ancaman terhadap kerajaan Melayu di Utara (Kedah dan Selangor) menyebabkan tawaran perlindungan oleh Inggris diterima kedua kerajaan tersebut dengan konsesi tertentu.¹⁵

Industri awal yang bertumbuh dengan aktor industri lintas etnis yaitu pertambangan memberikan konsekuensi konflik dan sekali lagi Inggris hadir memposisikan diri menjadi penengah dan stabilisator keamanan. Konflik

¹⁴ *Basic*: tentang eksistensi industri, *intermediate*: tentang pembuatan industri sendiri, *advance*: industri yang berjalan dengan semurninya logika industri. Dalam tulisan ini semua penekanan dalam fase *basic*.

¹⁵*Op, Cit.*, p.43

penambang-organisasi rahasia golongan Cina terjadi terjadi semenjak 1861 dalam *Larut Wars* mengancam posisi raja Abdullah. Kebijakan Chinese Protectorate (pada 1877 di Singapore dan 1884 di Malaka) menandai meningkatnya determinasi kebijakan Inggris kepada etnis Cina untuk mengurangi masalah sosial komunitas Cina seperti prostitusi, opium, perjudian, lotere, pemerasan, perampokan geng dan perkumpulan-perkumpulan rahasia.¹⁶¹⁷

Dengan melihat konflik etnis tersebut pihak Inggris melihat peluang dan mentransformasikan permasalahan kedalam etnisitas dengan berdiri pada pihak elit Melayu konsekuensinya etnis yang lain terutama Cina menjadi pihak yang bersebrangan. Inggris tidak meng"ada"kan diskursus etnisitas yang berkonfliktual tetapi meregulasikannya dan menebalkannya. Lahirnya masyarakat yang terbelah berdasarkan golongan merupakan konsekuensi nyata. Pandangan kelas dalam masyarakat bergeser ke arah etnisitas akibatnya muncul kerancuan yaitu melihat kelas asimetris berdasarkan identitas-etnisitas. Sementara kondisi faktual konflik berkembang seiring industrialisasi.

Tetapi harmonisasi Melayu sendiri tidak serta merta solid tetap terjadi gesekan, terlebih dalam perebutan "kue" ekonomi melalui pengambilan rente kerjasama Inggris-elit Melayu. Terbukti pada konflik komunal antara golongan Melayu yang terjadi pada 1867 dan 1869 karena perebutan jabatan dan siapa yang berhak mengumpulkan pajak.¹⁸ Inggris mengkonstruksi diskursus ketatanegaraan yang nantinya menjadi regularitas seperti memberi peraturan kepada setiap sultan, administratif, penegakan hukum, perpajakan dan pengukuran kemajuan ekonomi.¹⁹ Mengenai pandangan kompetisi internal golongan ini dijelaskan Marx yaitu kaum usahawan (atau pihak yang berada dalam siklus) menghadapi persaingan satu sama lain betapapun dipersatukan

¹⁶ R.N Jackson, *A Historical Monograph: Immigrant Labour and the Development of Malaya 1786-1920*. Federation of Malaya: Government Press, 1961. p.49-50

¹⁷ Gordon P.Means, *Malaysian Politics 2nd edition*, Singapore:Chong Moh & Company,1976. p.28

¹⁸ R.N Jackson, *A Historical Monograph: Immigrant Labour and the Development of Malaya 1786-1920*. Government Press:Federation of Malaya.1961. p.37

¹⁹ *ibid*

oleh suatu perhimpunan yang sungguh-sungguh tertutup.²⁰ Ini disebabkan oleh logika internal sistem itu sendiri yaitu kompetisi.

Diskursus etnisitas yang terpelihara sampai hari ini patahannya pertama kali terjadi dalam *Treaty of Pangkor* pada 1874. Pakta tersebut sekaligus sebagai penanda regulasi etnisitas. Khoo dalam Hirschman berpendapat pada tahun tersebut (*Treaty of Pangkor*) bukan hanya periode transformasi total politik dan ekonomi di wilayah Malaya tetapi titik yang menentukan perubahan pembangunan relasi etnis.²¹

Sementara regularitas terbentuk, industrialisasi signifikan terjadi sejak akhir abad 19 dan awal abad 20. Industri timah dan karet sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar. Pada tahun 1900 ruang Malaysia sebagai produsen timah terbesar di dunia dan tahun 1921 sebagai produsen separuh komoditas karet di dunia.²²

Pola perkembangan demografi mengikuti industri berbasis etnis pula. Pada 1850an populasi China meningkat secara signifikan dalam pembangunan industri timah yang pada 1880an terkonsentrasi membentuk mayoritas populasi perkotaan. Buruh kebanyakan berasal dari bagian Selatan Cina yang terbagi atas sub-etnis Hokkiens sebagai yang terbesar sedangkan yang lainnya yaitu Cantonese, Teoches, Hainanes dan Hakkas. Beberapa pengusaha besar etnis Cina era kolonial yaitu Eu Tong Sen, Lau Pak Kuan, Loke Yew, Tah Kah Kee dan Lee Kong Chian dimana kesemuanya bermain di industri timah dan perkebunan karet. Pengusaha etnis Cina yang lain mengambil peran signifikan pada industri perkapalan, perkebunan, perdagangan, perbankan, manufaktur dan media cetak.²³

²⁰ Karl Marx, *Kapital: Sebuah Kritik Ekonomi Politik Buku III*.terj. Oey Hay Djoen, Jakarta:Hasa Mitra.2007.p.184. Catatan dalam kurung tambahan penulis.

²¹ Kay Kim Khoo dalam Charles Hirschman,*The Making of Race in Colonial Malaya*, Sociological Forum, Vol.1, Issue 2 (Spring, 1986), pp.330-361

²² Virginia Matheson Hooker,*Short History Malaysia :linking east and west*, Singapore:South Wind, 2003. p.157

²³ Lihat Edmund Terence Gomez. *Chinese Business in Malaysia: Accumulation, Ascendance, Accommodation*, Curzon Press. Surrey:1999

Bagi golongan Cina *confusian heritage*²⁴ mendorong *spirit* usaha lebih agresif dan solid. Segregasi pekerja terlihat pada metode *recruitment*²⁵, mekanisme pengupahan, kondisi maupun tempat hidup yang berbeda membuat suatu sistem yang tetap menjaga keterpisahan dan pengelompokan antara buruh berdasarkan golongan.²⁶ David Campbel mengatakan relasi *power* dalam hal ini menghadirkan pembatasan *self/inside* – *others/outside*, tanpa garis batas tersebut gagasan keterpisahan tidak akan eksis²⁷ terlebih garis batas di topang oleh diskursus “the son of soil”/pribumi.

Populasi imigran India dan Srilanka terakselerasi pada 1900an yang berkontribusi besar sebagai pekerja industri karet.²⁸ Buruh India datang dari India Selatan (Tamil, Malayali, Telegu, Bengal), Srilanka, banyak dipekerjakan oleh Inggris untuk pembangunan infrastruktur dan pegawai negeri. Pedagang India bergerak di bidang katun, pakaian, perhiasan dan sebagainya yang di-impor dari India.²⁹ Pada tahun 1921 komposisi rasial (tidak termasuk wilayah Singapura) Melayu 54%, Cina 29.4%, India 15.1%, lainnya 1-5%.³⁰ Gelombang imigrasi menurun pada saat krisis ekonomi dunia 1930an dan secara kualitas maupun kuantitas legislasi tanda pemeriksaan imigran pada 1950an menjadi lebih ketat.³¹

²⁴ Sebuah pembahasan Weberian dalam analisa kultur bisnis, lihat Yao Souchou. *The Cultural limits of “Confucian Capitalism”: Power and the invention of the family among Chinese traders in Sarawak*, p.52-71, dalam Jomo K.S, Brian.C.Folk (editor), *Ethnic Business: Chinese capitalism in Southeast Asia*, Taylor & Francis e-Library, 2005

²⁵ Sistem *recruitment* buruh dikalangan Cina dikenal dengan sistem “Sin-Kueh” sebuah perbudakan bermodel *outsourcing*. Sistem dimana broker menjanjikan kekayaan dengan cepat ketika berada di pasar pekerja di Malaysia dibandingkan ditempat lain, mekanismenya yaitu buruh/*coolie* menandatangani kontrak kerja yang diajukan broker, broker menyalurkan kepada pengusaha Cina di Malaysia, broker mendapatkan sejumlah uang dari pengusaha, gaji *coolie* akan dibayarkan oleh pengusaha ketika modal pengusaha yang dibayarkan ke broker plus bunganya telah kembali sesuai masa kontrak. (Lihat R.N Jackson, 1961:44, Gordon.P.Means, 1976:27)

²⁶ T. H. Silcock, E. K. Fisk (ed.), *The Political Economy of Independent Malaya*, Singapore: Eastern University Press, 1963. p.9

²⁷ David Campbell dalam Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith (eds.), *International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd edition*, Oxford:Oxford University Press, 2013. p.234

²⁸ Jack A. Shaffer, *Inter-ethnic Relations in Peninsular Malaysia*, Humboldt Journal of Social Relations, Vol. 10, No. 1.1982.

²⁹ *Ibid.*, p.27

³⁰ Gordon P.Means, *op. cit.*, p.12

³¹ J.C.Caldwell, *The Demographic Background* dalam T.H Silcock dan E.K. Fisk, *op. cit.*, p.62

Dalam hal ini terlihat salah satu pola strategi pihak kolonial dalam mengkonstruksi industrialisasi yaitu meminimalisasi lemahnya legitimasi diskursus industri yang *basic* dengan pemolesan permukaan, menjaga jurang tidak lebar antara *das sein* – *das sollen* bagi Melayu. Pada umumnya wajah asli industri yaitu eksploitasi (alam dan manusia) secara permukaan dapat dengan mudah terdeteksi melalui kerusakan lingkungan dan eksploitasi manusia.

Konteks historis waktu itu kesadaran lingkungan dapat dikatakan belum menjadi *concern*, sekarang beralih ke sudut yang kedua yaitu manusia. Buruh yang biasanya sebagai pihak tereksplorasi dan menjadi wajah industri diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengenai pihak kaum Melayu. Jadi Inggris melonggarkan sistem dan golongan lain (non Melayu) didatangkan untuk mengisi posisi yang rentan dengan wajah suram industri tersebut dengan tetap menjaga keterkelompokannya dengan segregasi. Dilain pihak menjauhkan kaum Melayu dari kegiatan industri agar tetap menjaga Melayu statis di posisinya.

Pola kolonial untuk mengakui eksistensi Melayu dengan kesejahteraannya ditanggung Inggris-sultan yaitu "*pro melayu policies*" memelihara tradisi tradisional masyarakat Melayu dan ekonomi berbasis pertanian skala kecil (petani subsisten). Akibat kebijakan tersebut, golongan Melayu sulit masuk dengan kegiatan perekonomian yang lebih kompleks dan kompetitif di segala bidang terlebih industri dan juga permodelan politik yang tertutup dikalangan elit aristokrat menutup partisipasi popular.³² Inggris mengurangi politik riil Sultan sementara tetap melayaninya dengan pembagian "kue" ekonomi.

Perilaku aristokrat yang mengejar rente dan serangkaian sikap kooperatif mendapatkan kritikan dari cendekiawan pada awal abad 20 misalnya Munshi Abdullah. Tetapi kritikan tersebut justru menguatkan pihak Inggris dan

³² Gordon P.Means, *op. cit.*, p.43

relasinya terhadap elit lokal. Milner mengatakan membaca tulisan Munshi Abdullah seperti membaca tulisan Adam Smith.³³

Hirschman berpendapat semenjak pemerintah kolonial tidak pernah menerima golongan Cina sebagai penduduk permanen negara/warga asing/alien dan seringkali mempertanyakan loyalitas mereka maka tidak mengejutkan elit Melayu dan massa mempercayai dan meyakini Cina tidak mempunyai hak politik setara. Bagi elit Cina peraturan kolonial berupa kutukan dan karunia, disatu sisi banyak golongan Cina mendapatkan keuntungan ekonomi tetapi dilain pihak mereka termarginalisasi secara politik.³⁴ Perlakuan kolonial tersebut dikeluhkan oleh intelektual semisal Mahathir Mohamad yang nantinya menjadi ikon pemimpin industri kontemporer. Mahathir berpendapat “*even as independence brought the Malays increased opportunities, it has brought the Chinese even greater opportunities*”.³⁵

Untuk faktor krusial lainnya seperti budaya dan reliji juga diakomodasi oleh Inggris. Patahan untuk karakteristik regulasi ini berada pada pembentukan Majelis Ulama Islam dan Istiadat Melayu di Kelantan. Sebelumnya perlawanan Haji Mat Hassan/Tuk Janggut pada 1915 atas perubahan komposisi demografis, pergeseran nilai, degradasi moral dan kebijakan ekonomi kolonial (sistem pajak *flexible* ke *fixed rate*) menunjukkan *bargaining position* kepada Inggris dan oligarki sultan. Akomodasi dalam bentuk institusi dan kebijakan pajak dengan wacana pajak untuk sesuatu yang relijius (sumbangan ke Mesjid dan peruntukan lainnya).³⁶ Bahkan untuk perlawanan sekalipun Inggris tetap mengambil keuntungan dengan mengarahkan diskursus pembagian “kue” ekonomi.

Cara pandang etnisitas dan industri diperluas, ditonjolkan dan distabilkan disegala lini. Industri media cetak sebagai media pembentuk opini juga terkotakkan. Surat kabar pertama yang terbit 1806 di Penang, *New Strait Times* terbit pada 1825 kesemuanya dalam bahasa Inggris. Jawi Peranakan yang

³³ Milner dalam Lian Kwen Fee, *The construction of Malay identity across nations Malaysia, Singapore, and Indonesia*, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157 (2001), no: 4, Leiden, 861-879. p.864

³⁴ Charles Hirschman, *op. cit.*, p.355

³⁵ Mahathir Mohamad. *The Malay Dilemma 2nd edition*. Federal Publications Sdn Bhd. Selangor:1982. p.51

³⁶ Virginia Matheson Hooker, *op. cit.*, p.159-161

berbahasa Jawi terbit pada 1876, pada tahun yang sama terbit pula surat kabar berbahasa India, pada 1881 Lat Pau menjadi pionier surat kabar golongan Cina.³⁷ Surat kabar Utusan Melayu yang terbentuk 1907 menjadi surat kabar harian pada 1915 berperan popular pembentukan identitas “bangsa” dan modernitas Melayu.³⁸ Meskipun tidak menutup kemungkinan dasar pembuatan media tersebut dengan melihat pasar potensialnya masing-masing.

Begitu juga dengan pendidikan, melalui kebijakan Malay Reservation Act pada tahun 1913 pembangunan dan pembedaan sekolah berdasarkan etnis (Melayu, Cina, India).³⁹ Hal ini sekaligus penanda masuknya efek diskursus etnisitas dalam sistem pendidikan yang warnanya tetap eksis sampai abad 21 ini dan sulit memudar terkecuali ada situasi patahan yang sangat luar biasa.

Metode sensus di semenanjung Malaya turut mengkonstruksi penonjolan konfigurasi dengan penyajian data per golongan.⁴⁰ Benedict Anderson berpendapat zona kolonisasi yang memasuki aspek reproduksi mekanis yaitu sensus, pemetaan dan museum.⁴¹ Dalam koloni Inggris kebanyakan sensus lebih dari sekedar perhitungan kepala tetapi termasuk karakteristik sosial untuk mendukung metode segregasi yang merupakan signifikan faktor *pattern* pembangunan urban dalam *British Empire*.⁴²

Sementara investasi dan perputaran bisnis kolonial terus berjalan membesar di semua lini tidak terkecuali disektor industri migas. Akhir tahun 1870an minyak pertama kali ditemukan di kawasan Borneo (sekarang Malaysia) tetapi jumlah yang lebih besar baru ditemukan pada awal awal tahun 1900an.⁴³ Sumur minyak pertama di temukan pada tahun 1910 (sumur minyak ini sekarang menjadi monumen negara bernama *the Grand Old Lady*) dan pada 1914

³⁷ Mohamed Hashim bin Ahmad Makaruddin, *The Future of the Newspaper Industry in Malaysia*, Malaysian Journal of Communication, Vol 22, 2006. pp.156-161. p.156

³⁸ Milner dalam Lian Kwen Fee, *op. cit.*, p.865

³⁹ Shamsul dalam Anthony Milner, *op. cit.*, p.120

⁴⁰ Lihat Charles Hirschman, *The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An Analysis of Census Classifications*. Journal of Asian Studies, vol.46, issue 3 (Aug.,1987), pp:552-582.

⁴¹ Benedict Anderson, *Op, Cit.*, p.163

⁴² A. J. Christopher, *Urban Segregation Levels in the British Overseas Empire and Its Successors, in the Twentieth Century*, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 17, No. 1 (1992), pp. 95-107. p.96,97

⁴³ Fred R.von der Mehden, *op. cit.*,

refinery pertama di bangun keduanya berada di Miri, Serawak, kemudian Lutong Refinery 1916 (*refinery* pertama di Malaysia yang mendapatkan ISO 9002 pada tahun 1993) oleh Shell⁴⁴, Port Dickson Refinery pada 1963. Tahun 1963 ditemukan ladang *offshore* pertama di Baram, Serawak oleh Shell. Pada tahun 1960an tercatat Shell dan Esso mendominasi baik *upstream* maupun *downstream*.⁴⁵

Di wilayah Brunei perusahaan Shell yang aktif sejak tahun 1929 memonopoli eksplorasi minyak di bawah bendera British Malayan Petroleum (BMP).⁴⁶ Shell mendominasi produksi minyak di Malaysia Timur, sampai setelah periode paska kolonial pada tahun 1964. Shell mengestimasi memiliki kapitalisasi £48 juta dalam *oil production, refining* dan aktivitas eksplorasi *offshore* di Sabah dan Serawak. Trajektorinya nanti ditemukan model strategi Petronas mereplika strategi Shell sebagai salah satu perusahaan patronnya.⁴⁷

Sentralitas ekonomi Malaysia Timur dalam industri *shipping* sampai pada 1968 dimonopoli oleh agen H&C (Harrisons & Crosfield Ltd) dan BCL (the Borneo Company Ltd). Semenjak 1900 *traders* mengambil peran signifikan sebagai *managing agents of direct investment* dalam produksi komoditas terutama *rubber*. Perusahaan Sir John Hay mempunyai 150.000 hektar perkebunan karet, kelapa sawit dan dua pertambangan timah, sebuah investasi yang diestimasi 35 juta poundsterling pada 1958. Pertengahan 1960an diestimasi 180 perusahaan Inggris memiliki 800.000 hektar pohon karet atau 59% dari total di semenanjung Malaka. Sektor perbankan yang beroperasi yang

⁴⁴ Shell pertama kalinya merupakan pemain dalam bidang distribusi minyak (*shipping*) oleh Samuel bersaudara dan sukses sebagai pemain sektor ini setelah berhasil melewati kanal Suez pada tahun 1892. Pada tahun 1897 bernama Shell Transport and Trading Co. Pada 1890 perusahaan Royal Dutch mengerjakan ladang minyak di Sumatera (pangkalan Brandan). Di bawah manajemen Henry Deterding yang dijuluki Rockefeller dari Eropa sukses membesarkan perusahaan dengan melakukan merger Royal Dutch dan Shell transport (komposisi 60%:40%) sehingga terintegrasi vertikal. Hal tersebut untuk mengimbangi ekspansi Standard Oil yang membentuk Asiatic Petroleum Company. Untuk Deterding Lihat David Palmer. *Sir Henry Deterding and Royal Dutch-Shell: Changing Control of World Oil, 1900-1940 (review)*. Oxford University Press, Enterprise & Society, Volume 4, Number 4, December 2003, pp. 719-720.

⁴⁵ Shell website, <http://www.shell.com.my/aboutshell/who-we-are/history/malaysia.html> akses 13/12/2012

⁴⁶ Hatun Abdul Majid, *op. cit.*, p.22

⁴⁷ Lihat Muhaimin Z.Achsin, *Ekonomi Politik Strategi Optimalisasi Rantai Petronas*, tesis paska-sarjana UGM, Yogyakarta, 2014.

dimiliki oleh Inggris mencakup 4 besar yaitu Chartered Bank of India, Australia and China, the Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), the Eastern Bank dan the Mercantile Bank of India dimana kesemuanya berjejaring dengan agen-agen pedagang.⁴⁸

Sementara letak kekuatan ekonomi golongan Melayu dalam ekonomi skala kecil berlokasi sub-urban. Visualisasi populasi dalam semenanjung Malaysia (tidak termasuk Singapura) pada tabel⁴⁹ berikut ini :

Golongan	Persen Populasi			Komposisi Distribusi Urban	
	1931		1957	1947	1957
Melayu	49.2%	49.5%	49.8%	19.0%	21.0%
Cina	33.9%	38.4%	37.2%	63.1%	62.6%
India	15.1%	10.8%	11.3%	14.7%	12.8%
Populasi	3,7 juta	4,9 juta	6,2 juta	918,385	1,6juta

Aktivitas perekonomian di rural area terbagi menjadi dua tingkatan yaitu tingkatan lanjut pertanian, perkebunan, pertambangan, perusahaan komersil dipunyai dan dikelola sebagian besar oleh non-pribumi (China-India). Sedangkan tingkatan terbelakang pada produksi skala kecil karet, kopra, padi dan hasil laut dikelola oleh pribumi.⁵⁰

Perbedaan distribusi dominan etnis non-pribumi di perkotaan “orang kota” dan Melayu di pedesaan “orang desa” turut berkontribusi pada diskursus industrialisasi dan pembangunan dengan menaikkan narasi dominasi profesionalitas, kebiasaan, cara berpikir dan bekerja etnis satu terhadap etnis lainnya. Hal ini membentuk diskursus superioritas – inferioritas, *ethnic inequality* golongan satu terhadap lainnya.

Sementara masuknya invasi Jepang merubah kondisi ekonomi politik sosial keamanan dimana deligitimasi Inggris berada pada palung terdalam. Superioritas Melayu terkonstruksi melalui praktek disiplin sehari-hari yang

⁴⁸ Nicholas J.White, *British Business in Postcolonial Malaysia, 1957-70: 'Neo-colonialism' or 'disengagement'?*, Taylor & Francis e-Library, 2005. p.3-6

⁴⁹ Dorothy Z.Fernandes, Amos H.Hawley, Silvia Predaza edited by R.Chander J.M.N. *The population of Malaysia*. C.I.C.R.E.D Series. Desember 1975

⁵⁰ E.K Fisk, *Features of the Rural Economy* dalam T.H Silcock, *op. cit.*, p.163

dilakukan Jepang. Oleh karena itu strategi Inggris yang terlihat setelah perang dunia kedua zona pasifik yaitu melakukan *re-grip* kekuasaan dan merestorasi relasi dengan elit Melayu.

Konstalasi internasional dan regional (perang dingin) berpengaruh besar. Sekali lagi Inggris memposisikan diri untuk mempertahankan elit Melayu dari perubahan yang dapat mengancam formasi lokal. Posisi Malaysia yang terjepit kekuatan sosialis (Utara : Vietnam-China, Selatan: Indonesia dibawah Sukarno) memberikan keuntungan tersendiri oleh Inggris. Disamping penjelasan umum tentang *trigger* perang, konfrontasi⁵¹ dengan Indonesia merupakan sebuah keuntungan bagi Inggris untuk membangun legitimasi eksistensi kembali setelah dipencundangi dengan singkat oleh Jepang⁵² ketika memasuki semenanjung Malaya. Perang dan anti-komunis merupakan skema yang dibutuhkan demi kembalinya legitimasi Inggris.

Konfrontasi Malaysia (Inggris) – Indonesia sekaligus sebagai patahan resmi cara pandang rakyat Malaysia melihat Indonesia dan sebaliknya. Perbedaan perlakuan kolonial dan daerah koloni (Inggris:Malaysia, Belanda:Indonesia) memberikan kondisi dan diskursus yang berbeda. Inggris yang bermain di zona kooperatif, akomodatif dan Belanda yang murni penghisapan dan koersif. MPAJA merupakan gerilyawan komunis (yang dominan terisi oleh etnis Cina) yang melakukan pemberontakan era Jepang yang tadinya di dukung oleh Inggris kemudian hari setelah Jepang kalah dijadikan musuh bersama. Oleh karena upaya *re-grip* itu transfer kekuasaan Inggris ke elit Melayu berlangsung damai tanpa melalui serangkaian ketegangan fisik dan pembentukan partai politik juga mengikuti efek etnisitas yaitu UMNO (Melayu), MIC (India), MCA (Cina) sebagai reaksi proposal Malaysia Union oleh Inggris.

Kapitalisasi dalam industri sebagai alasan terbesar *re-grip* tersebut. Pada 1963 komisioner Jenderal Lord Selkirk menginformasikan ke PM Harold

⁵¹ Reaksi atas rencana pembentukan Federasi Malaysia pada 1961, kebijakan Dwikora pada Mei 1963, Ganyang Malaysia Juli 1963 dan protes internasional ketika Indonesia keluar dari PBB tahun 1964

⁵² Jepang masuk ke daerah kekuasaan Inggris di Semenanjung Malaka pada 15 Februari 1942 ketika Percival menyerah kepada panglima tentara XXV Jepang Letjen Tomoyuki Yamashita. Lihat Triana Wulandari et.al

Macmillan bahwa investasi mereka di Malaysia lebih besar daripada di India oleh karena itu harus mendukung keberlanjutan pertahanan Inggris di Malaysia. Setelah pembentukan Federasi Malaysia komisioner perdagangan Inggris di Kuala Lumpur mengestimasi 400-500 juta poundsterling telah di-investasikan di wilayah tersebut.⁵³ Reddaway melaporkan pendapatan setelah pajak dari kapitalisasi Inggris di Malaysia antara 1955 dan 1964 mencapai 19.8%/tahun dimana Malaysia merupakan negara kedua *profitable destination* setelah German Barat.⁵⁴ Diskursus industri juga semakin kuat setelah ditopang dengan pengetahuan umum internasional mengenai bagaimana mengatur negara, pembangunan dan indikator ekonomi menurut model Keynesian⁵⁵ dan perkembangan ekonomi mainstream.

Kesimpulan

Tulisan ini berusaha bersedikit dalam retorika dan berbanyak dalam analisa. Melalui pemeriksaan beralur historis diketahui bahwa diskursus etnisitas yang sampai sekarang mengkristal dalam keseharian masyarakat ruang Malaysia bukan merupakan permasalahan etnis/identitas *per se* serta domestik tetapi merupakan efek dan transformasi dari tujuan ekonomi kolonial dalam hal ini industrialisasi (internasional). Dalam perkembangannya relasi etnisitas dan industrialisasi saling menopang serta meneguhkan dan disaat yang bersamaan konfliktual.

Diskursus industrialisasi yang diperkenalkan pada awalnya adalah pengetahuan dasar/*basic* yang ingin menjawab eksistensi industri itu sendiri. Karena eksistensi industri tidak terjadi di ruang hampa maka eksistensi industri tidak dapat berdiri otonom tetapi berpararel terhadap legitimasi subjek dan kondisinya. Subyek determinan dalam hal ini adalah pihak Inggris. Inggris tidak sekuat yang dibayangkan dalam merengkuh semua aspek sosial ekonomi politik

⁵³ Nicholas J. White, *op. cit.*, p.4

⁵⁴ W.B.Reddaway dalam Nicholas J. White, *ibid.*, p.7

⁵⁵ Model intervensi negara-pemerintah terhadap pasar, pengupayaan *full-employment*, pengupayaan padat karya dan sebagainya. Lebih lanjut lihat John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, Australia: Gutenberg Project, 2003.

di Semenanjung Malaya dan Utara Kalimantan. Oleh karena itu strategi-strategi mutlak diperlukan. Strategi itu berupa *positioning*, kooperatif, bermitra strategis, segregasi (baik sebagai strategi maupun efek), penebalan etnisitas (berbasis identitas) yang efeknya ke segala lini. Harmoni rasial hadir dalam wujud yang menegangkan. Peristiwa berdarah 13 Mei 1969 boleh jadi merupakan trajektori permasalahan ini (selain penjelasan khusus mengenai detik-detik kejadian) dan penanda utama era konteks Malaysia.

Ekskalasi permasalahan yang mengancam kekuasaan elit lokal merupakan keuntungan bagi kolonial. Strategi ini cukup ampuh digunakan bahkan sampai pos perang dunia ke dua untuk *regrip*. Industrialisasi tampil dengan wajah yang cukup baik bagi golongan tuan rumah Melayu (walaupun tidak untuk keseluruhan) sedangkan wajah suramnya dalam kondisi buruh di dua golongan lainnya. Hal ini memberikan efek visual yang bekerja produktif bagi diskursus industri untuk hidup, bertahan dan beroperasi. Pendekatan kritis ini hanya dapat digunakan untuk memeriksa, menguraikan, memperlihatkan patahan dan memberikan analisa atasnya dan tidak dapat lebih jauh dari itu misalnya untuk memberikan jawaban atas apa yang seharusnya dilakukan. Oleh karena itu penggunaan kata “saran” disamping kesimpulan merupakan hal yang mustahil.

Daftar Pustaka

Achsin, Muhaimin Zulhair. *Ekonomi Politik Strategi Optimalisasi Rantai Nilai Petronas, tesis paska-sarjana UGM*. Yogyakarta, 2014.

Dorothy Z.Fernandes, Amos H.Hawley, Silvia Predaza edited by R.Chander J.M. *The population of Malaysia*. C.I.C.R.E.D Series.

Fee, Lian Kwen. *The construction of Malay identity across nations Malaysia, Singapore, and Indonesia*. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 157, no: 4, Leiden, 2001: 861-879.

Foucault, Michel. *Dicipline and Punish: The Birth of the Prison, 2nd edition* translated by Alan Sheridan. New York: Vintage Book, 1995.

—. *Wacana Kuasa/Pengetahuan*.terj.Yudi Santosa. Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002.

Gomez, Edmund Terence. *Chinese business in Malaysia: accumulation, ascendance, accommodation*. Surrey: Curzon Press, 1999.

Hirschman, Charles. *The Making of Race in Colonial Malaya*." Sociological Forum, Vol.1, Issue 2, Spring, 1986: 330-361.

Hirschman, Charles. *The Meaning and Measurement of Ethnicity in Malaysia: An Analysis of Census Classifications*. Journal of Asian Studies,vol.46, issue 3 , (Aug.,1987): 552-582.

Hooker, Virginia Matheson. *Short History Malaysia :linking east and west*. Singapore: South Wind, 2003.

Jackson, R.N. *A Historical Monograph: Immigrant Labour and the Development of Malaya 1786-1920*. Government Press: Federation of Malaya, 1961.

Jomo K.S, Brian.C.Folk (editor). *Ethnic Business: Chinese capitalism in Southeast Asia*. Taylor & Francis e-Library, 2005.

K.S, Jomo. *Malaysian Industrial Policy*. Singapore: NUS Press, 2007.

Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. Gutenberg of Australia eBook, 2003.

Lopez, Leslie. "Petronas: reconciling tensions between company and state." In *Oil and Governance: State-owned enterprises and the world energy supply*, by David R.Hults, Mark C. Thurber David G.Victor. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Majid, Hatun Abdul. *Rebellion in Brunei: The 1962 revolt, Imperialism, Confrontation and Oil*. London: I.B Tauris.

Makaruddin, Mohamed Hashim bin Ahmad. "The Future of the Newspaper Industry in Malaysia." *Malaysian Journal of Communication*. Vol 22, 2006: 156-161.

Marianne W. Jorgensen terj. Imam Suyitno dkk. *Louise J. Philips. Analisis Wacana: Teori dan Metode*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Mehden, Fred R. von der. *Petronas: A National Oil Company with A International Vision*. the James A. Baker III Institute For Public Policy Rice University, 2007.

Mohamad., Mahathir. *The Malay Dilemma 2nd edition*. Selangor: Federal Publications Sdn Bhd, 1982.

P. Means, Gordon. *Malaysian Politics*. Singapore: Chong Moh & Company, 1976.

Shaffer, Jack A. "Inter-ethnic Relations in Peninsular Malaysia." *Humboldt Journal of Social Relations*, Vol. 10, No. 1, 1982: 62-82.

T. H. Silcock, E. K. Fisk (ed.). *The Political Economy of Independent Malaya*. Singapore: Eastern University Press, 1963.

Tim Dunne, Milja Kurki and Steve Smith (eds.). *International Relations Theories: Discipline and Diversity 3rd edition*. Oxford: Oxford University Press, 2013.

Triaman Wulandari, Dwiana Herculani, et.al. *Sejarah Wilayah Perbatasan Batam-Singapura (1824-2009)*. Depok: Gramata, 2009.

Wan Fairuz Wan Chik, S. Selvadurai, A. C. Er. "Historical of Industrial Development Strategies in Penang over the Last Five Decades: A Study of the SMEs." *Asian Social Science*; Vol. 9, No. 6, 2013: 74-83.